



**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA KEJAKSAAN NEGERI MIMIKA**

TESIS

*Untuk memenuhi salah satu syarat Ujian
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum*

Oleh:

**DONNY STIVEN UMBORA
NIM. 2020025015019**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MIMIKA**

Telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal, 24 Juni 2022

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002

Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum
Nip. 19641009 199003 1 003

Mengetahui

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**



Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum.
NIP: 19660302 199303 1 002

PELAKSANAAN UJIAN

PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MIMIKA

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Ujian Tesis

pada Tanggal: 24 Juni 2022

Dewan Penguji,

Ketua/Anggota : Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum.
NIP. 19660302 199303 1 002


(.....)


Sekretaris/Anggota : Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum
NIP. 19641009 199003 1 003

(.....)

Anggota : Dr. Kristina Sawen, S.H.,M.H.
NIP. 19780924 200212 2 001


(.....)

Anggota : Dr. Nur Asmarani, S.H.,M.H
NIP. 19630913 199003 2 002


(.....)

Anggota : Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H
NIP. 19600713 198903 1 002


(.....)

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Jayapura, 10 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

DONNY STIVEN UMBORA
NIM. 2020025015019

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Mimika, dimaksudkan untuk menganalisis upaya Kejaksaan Negeri Mimika dalam memaksimalkan pengembalian kerugian negara melalui penerapan pidana tambahan uang pengganti dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan, menggunakan analisis kualitatif.

Upaya Kejaksaan Negeri Mimika menerapkan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dimulai sejak tahap pra-adjudikasi yakni melakukan penyitaan terhadap aset tersangka, selain untuk kepentingan pembuktian tetapi juga kaitannya dengan pidana tambahan uang pengganti. Upaya lain yakni meminta perhitungan kerugian keuangan negara kepada auditor BPK ataupun BPKP, melakukan penelusuran aset, serta menghimbau tersangka untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil perhitungan auditor. Pada tahap adjudikasi, dilakukan tuntutan pidana tambahan uang pengganti dalam amar putusan dan pada tahap purna adjudikasi dilakukan perampasan aset serta lelang aset untuk membayar pidana tambahan uang pengganti. Hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Timika dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara rinci mengatur tentang masalah pengembalian kerugian keuangan negara (pengembalian aset negara) akibat tindak pidana korupsi. Pola pikir jaksa penyidik yang pada umumnya lebih mengutamakan bagaimana supaya penyidikan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan dan dapat membuktikan kesalahan tersangka hingga berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum. Serta kemampuan dalam melakukan penelusuran aset serta kurangnya dukungan fasilitas/sarana dan prasarana termasuk dukungan finansial.

Untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui penerapan pidana tambahan uang pengganti, maka disarankan agar penyidik memberikan perhatian khusus dalam menelusuri aset tersangka, melakukan penyitaan, dan pendekatan kepada tersangka agar secara sukarela mengembalikan kerugian keuangan negara. Perlu dilakukan penyempurnaan peraturan terkait dengan penelusuran aset dan mengatur secara rinci mengenai penelusuran aset, meningkatkan kapasitas penyidik dalam melaksanakan penelusuran aset (*asset tracing*), serta dukungan fasilitas dan anggaran yang memadai. Kepada masyarakat dihimbau untuk turut memberikan dukungan kepada penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Korupsi, pidana uang pengganti, peran kejaksaan.

ABSTRACT

The research with the title Application of Additional Penalty in the Corruption Crime Case at the Mimika District Prosecutor's Office, is intended to analyze the efforts of the Mimika District Attorney's Office in maximizing the return of state losses through the application of additional criminal compensation and the obstacles faced in eradicating criminal acts of corruption, using legal research methods. normative approach, through legislation approach, concept approach and case approach by collecting legal materials through literature study, using qualitative analysis.

The Mimika District Prosecutor's Office's efforts to apply the additional penalty of substitute money in a corruption crime started from the pre-adjudication stage, namely confiscation of the suspect's assets, not only for the sake of proof but also in relation to the additional penalty of replacement money. Other efforts include requesting a calculation of state financial losses from the BPK or BPKP auditors, conducting asset searches, and calling on suspects to return state financial losses in accordance with the results of the auditor's calculations. At the adjudication stage, criminal charges are made for additional replacement money in the verdict and at the post-adjudication stage, asset confiscation is carried out and an asset auction is carried out to pay the additional penalty for replacement money. The obstacles faced by the Timika District Prosecutor's Office in applying the additional penalty of compensation money are Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which does not specifically regulate the issue of returning state financial losses (returning state assets) due to corruption. The mindset of the investigating prosecutor who generally prioritizes how the investigation he carries out fulfills the alleged elements of the article and can prove the suspect's guilt until the investigation file is declared complete by the public prosecutor. As well as the ability to track assets and the lack of support for facilities/facilities and infrastructure, including financial support.

In order to maximize the return of state financial losses through the application of additional criminal compensation for money, it is recommended that investigators pay special attention to tracing the assets of the suspect, confiscate, and approach the suspect to voluntarily return state financial losses. It is necessary to improve regulations related to asset tracing and regulate in detail the tracking of assets, increase the capacity of investigators in carrying out asset tracing, as well as support for adequate facilities and budgets. The public is encouraged to participate in providing support to law enforcement in eradicating corruption.

Keywords: Corruption, substitute money, the role of the prosecutor.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto : “Disetiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(Donny Stiven Umbora)

Persembahan:

Dengan rendah hati Tesis ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah terkasih alm. Nepram Samber, SH dan Ibunda Luvina Runggeari atas segala pengorbanan, doa dan kasih sayang mereka.
2. Bapak mertua alm. Frits K. Imbiri dan ibu mertua alm. Sri Rahayu.
3. Istri tercinta Mellisa D. Imbiri, A.Md dan anak kami tersayang Sean Jeriko Umbora atas kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tiada henti.
4. Adik-adik tersayang Loretha Natalia Samber dan Melisa Holandia Samber.
5. Almamater Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

KATA PENGANTAR

Kepada Tuhan sumber pengetahuan dan kebijaksanaan penulis panjatkan Puji dan Syukur karena atas melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga seluruh tahapan studi dan penulisan tesis dapat dilalui dengan baik. Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Selama studi sampai pada penulisan Tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan, oleh karenanya pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, penulis menghaturkan terimah kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT, Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, atas kesempatan yang diberikan untuk studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran membimbing dan mengarahkan demi selesainya penulisan Tesis ini.
4. Dr. Basir Rohrohmana, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis.

5. Bapak serta Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah mengasah dalam berpikir dan menganalisis berbagai hal tentang Hukum.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Mimika yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata Dua (S2).
7. Staf administrasi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih atas segala layanan administrasi yang telah diberikan dengan baik.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini dengan lancar dan baik.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan hukum, terutama dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini masih masif terjadi.

Jayapura, Juni 2022

Donny Stive Umbora

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya... ..	12
B. Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi	36
C. Landasan Teori.	54
D. Kerangka Pikir	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kejaksaan Negeri Mimika Menerapkan Pidana Tambahkan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	74
B. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Mimika Menerapkan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98